

A. TABEL CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2023

Urusan Pemerintan	Kebijakan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target		Realisasi			Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tinda k Lanjut OPD
				Target	Rp	Target	Rp	%			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Perbub nomor 23 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Program Penunjang Urusan Pemereintah Daerah Kab/Kota		12 Bulan	Rp 5.608.532.212	12 Bulan	Rp 5.285.855.134	94,2%	Tidak Ada Masalah	-	-
		Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersedia	6 Dok	Rp 14.900.000	6 Dok	Rp 13.100.000	87,9%	Tidak Ada Masalah	-	-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Yang Disusun	6 Dok	Rp 14.900.000	6 Dok	Rp 13.100.000	87,9%	Efisiensi belanja yang merupakan sisa belanja Belanja cetak atau fotocopy dokumen dokumen perencanaan untuk tahun 2023.	Akan di akomodir kembali sesuai aturan	-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan OPD	12 BuLan	Rp 3.658.301.462	12 BuLan	Rp 3.415.479.006	93,4%	Tidak Ada Masalah	-	-

		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Dibayarkan Gaji dan Tunjangan ASN	12 BuLan	Rp 3.481.171.462	12 BuLan	Rp 3.248.323.228	93,3%	Tidak Ada Masalah	-	-
		Penyedia Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan honorarium	1 Dok	Rp 176.130.000	1 Dok	Rp 166.155.778	94,3%	Tidak Ada Masalah	-	-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun	1 Dok	Rp 1.000.000	1 Dok	Rp 1.000.000	100,0%	Tidak Ada Masalah	-	-
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah DOKumen Kartu Inventaris	8 Dok	Rp 68.000.000	8 Dok	Rp 52.818.150	77,7%	Tidak Ada Masalah	-	-
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah OPD Yang Diamankan	8 Dok	Rp 68.000.000	8 Dok	Rp 52.818.150	77,7%	Sisa anggaran sebesar Rp. 15,181,850 merupakan Efisiensi belanja yang merupakan sisa belanja asuransi kendaraan 2023.	Akan di akomodir kembali sesuai aturan	-

		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	130 Stel	Rp 68.800.000	130 Stel	Rp 68.800.000	100,0%	Tidak Ada Masalah	-	-
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Yang Tersedia Beserta Perlengkapannya	130 Stel	Rp 68.800.000	130 Stel	Rp 68.800.000	100,0%	Pada Subkegiatan ini diperlukan Pagu Anggaran tambahan untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dan kedisiplinan.	Penambahan Anggaran Belanja	-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Rp 461.192.150	12 Bulan	Rp 459.445.217	99,6%	Tidak Ada Masalah	-	-
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Penerangan Kantor	12 Bulan	Rp 11.108.000	12 Bulan	Rp 11.108.000	100,0%	Tidak Ada Masalah	-	-

		Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Paket	Rp 65.923.000	3 Paket	Rp 65.840.000	99,9%	Pada Subkegiatan ini sangat diperlukan Pagu Anggaran tambahan untuk ketersediaan sarana dan praasarana penunjang layanan administrasi perkantoran	Penambahan Anggaran Belanja	-
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	1404 Kotak	Rp 30.000.000	1000 Kotak	Rp 30.000.000	100,0%	Tidak Ada Masalah	-	-
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak (Blangko atau Formulir dan Penggandaan	12 Bulan	Rp 19.320.000	12 Bulan	Rp 19.100.000	98,9%	Tidak Ada Masalah	-	-
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	1500 Eksem pler	Rp 6.600.000	1500 Eksem pler	Rp 5.200.000	78,8%	Tidak Ada Masalah	-	-

		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan	Rp 328.241.150	12 Bulan	Rp 328.197.217	100,0%	Pada Subkegiatan ini sangat diperlukan Pagu Anggaran tambahan mengingat banyaknya Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang tidak dapat dilaksanakan berkaitan dengan urusan perhubungan	Penambahan Anggaran Belanja	-
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah OPD Yang Tersedia	12 Unit	Rp 734.942.000	12 Unit	Rp 732.466.800	99,7%	Tidak Ada Masalah		-

		Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan atau mesin lainnya	12 Unit	Rp 734.942.000	12 Unit	Rp 732.466.800	99,7%	Pada Subkegiatan ini sangat diperlukan Pagu Anggaran tambahan mengingat banyaknya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran yang belum terpenuhi	Penambahan Anggaran Belanja	-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	Rp 127.087.600	12 Bulan	Rp 126.628.202	99,6%	Tidak Ada Masalah	-	-
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar Yang Terkelola	12 Bulan	Rp 1.420.000	12 Bulan	Rp 1.400.000	98,6%	Tidak Ada Masalah	-	-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Hitungan Beban Telepon/ Air / Listrik yang terpakai/dibayarkan	12 Bulan	Rp 102.995.600	12 Bulan	Rp 102.976.202	100,0%	Tidak Ada Masalah	-	-
		Pelayanan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Layanan Jasa Umum Kantor	12 Bulan	Rp 22.672.000	12 Bulan	Rp 22.252.000	98,1%	Tidak Ada Masalah	-	-

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bangunan/Kendaraa n Kantor Kondisi Baik	96 Unit	Rp 475.309.000	96 Unit	Rp 417.117.759	87,8%	Tidak Ada Masalah	-	-
		Penyediaan Jasa Pemeiharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Terpelihara	54 Unit	Rp 426.709.000	54 Unit	Rp 368.629.259	86,4%	Sisa anggaran sebesar Rp. 417,117,749 merupakan Merupakan efisiensi dari Belanja Bahan Bahan Bakar dan Pelumas dikarenakan terdapat kerusakan pada salah satu kendaran dinas operasional lapangan.	Akan di akomodir kembali sesuai aturan	-
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	42 Unit	Rp 48.600.000	42 Unit	Rp 48.488.500	99,8%	Tidak Ada Masalah	-	-

Peningkatan aktivitas/konektivitas perekonomian yang merata dari desa sampai kota yang lebih ditopang dari sektor ekonomi kerakyatan dan Pembangunan kabupaten yang berkelanjutan		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Tingkat Tertib Lalu Lintas Angkutan Jalan	100%	Rp 1.174.968.000	100%	Rp 1.153.312.430	98,2%	Tidak Ada Masalah	-	-
	PERMENHUB NO. 19 TAHUN 2021, BN 2021 / NO. 531, 57 HLM	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	8 Paket	Rp 272.200.000	8 Paket	Rp 258.872.430	95,1%	Tidak Ada Masalah	-	-
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Yang Tersedia	1 Paket	Rp 236.200.000	1 Paket	Rp 222.928.848	94,4%	Tidak Ada Masalah	-	-

		Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	6 Paket	Rp 6.000.000	6 Paket	Rp 6.000.000	100,0%	Tidak Ada Masalah	-	-
	UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Yang Tersedia	1 Paket	Rp 30.000.000	1 Paket	Rp 29.943.582	99,8%	Tidak Ada Masalah	-	-
		Pelaksanaan manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jarngan Jalan	Persentase Pelaksanaan manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jarngan Jalan	100%	Rp 726.380.000	100%	Rp 718.720.000	98,9%	Tidak Ada Masalah	-	-
		Pengawasan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Operasi Pengawasan dan Pengendalian	36 Kali	Rp 726.380.000	36 Kali	Rp 718.720.000	98,9%	Tidak Ada Masalah	-	-

	PP Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan	Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 Opera si	Rp 146.388.000	6 Opera si	Rp 145.720.000	99,5%	Tidak Ada Masalah	-	-
		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Yang Dilaksanakan	6 Opera si	Rp 146.388.000	6 Operas i	Rp 145.720.000	99,5%	Tidak Ada Masalah	-	-
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1 Paket	Rp 30.000.000	1 Paket	Rp 30.000.000	100,0%	Tidak Ada Masalah	-	-

		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 Paket	Rp 30.000.000	1 Paket	Rp 30.000.000	100,0%	Pada Subkegiatan ini sangat diperlukan Pagu Anggaran tambahan untuk mendukung tertib keselamatan pengguna angkutan dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas	Penambahan Anggaran Belanja	-
Peningkatan aktivitas perekonomian yang merata		Program Pengelolaan Pelayaran	Tingkat Pemenuhan Pengelolaan Pelayaran	100%	Rp 1.512.100.000	100%	Rp 1.495.520.400	98,9%	Tidak Ada Masalah	-	-

dari desa sampai kota yang lebih ditopang dari sektor ekonomi kerakyatan dan Pembangunan kabupaten yang berkelanjutan	PP Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah kabupaten/Kota Yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah kabupaten/Kota Yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api kabupaten/Kota	12 Bulan	Rp 1.185.100.000	12 Bulan	Rp 1.169.217.250	98,7%	Tidak Ada Masalah	-	-
---	---	---	--	----------	------------------	----------	------------------	-------	-------------------	---	---

		Pengendalian dan pengawasan jaringan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten/kota dalam daerah kabupaten/kota	Meningkatnya Ketertiban angkutan di kawasan pelabuhan laut & sungai	12 Bulan	Rp 1.185.100.000	12 Bulan	Rp 1.169.217.250	98,7%	Tidak Ada Masalah	-	-
	PP Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Halte Sungai dalam kondisi baik	2 Unit	Rp 327.000.000	2 Unit	Rp 326.303.150	99,8%	Tidak Ada Masalah	-	-

		Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dalam kondisi baik	1 Unit	Rp 109.000.000	1 Unit	Rp 108.641.100	99,7%	Pada Subkegiatan ini sangat diperlukan Pagu Anggaran tambahan untuk mendukung pengembangan pelabuhan RORO Kuala Tungkal mengingat meningkatnya minat pengguna jasa kepelabuhan	Penambahan Anggaran Belanja	-
		Pemeliharaan Dermaga Sngai	Jumlah Halte Sungai dalam kondisi baik	1 Unit	Rp 218.000.000	1 Unit	Rp 217.662.050	99,8%	Pada Subkegiatan ini sangat diperlukan Pagu Anggaran tambahan untuk menjaga prasarana laut kondisi baik yang menjadi penghubung antar desa ke kota	Penambahan Anggaran Belanja	-
Jumla Total					Rp 8.295.600.212		Rp 7.934.687.964				

Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan tugas / kegiatan sekarang ini berpedoman kepada Tugas Pokok dan Fungsi yang menjadi wewenang atau yang telah diamanahkan / digariskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagai suatu instansi yang bertugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan, maka Dinas Perhubungan berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan Pelayanan atau Pembinaan kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas Aparatur serta mendorong terwujudnya capaian kinerja dengan melaksanakan program-program dan kegiatan yang lebih terarah, berdasarkan Renstra 2021 - 2026 dan mengaplikasikannya kepada kegiatan-kegiatan tahunan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan, maka dalam rangka pertanggungjawaban kinerja, Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan tugas telah menetapkan 7 Indikator Kinerja Sasaran yang menjadi Pedoman dan Pengukuran Kinerja Instansi, yaitu:

1. Persentase Trayek Angkutan Darat Yang Tersedia
2. Jumlah Halte Sungai Yang Tersedia⁴⁾ Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD
3. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal
4. Kapasitas Ruas Jalan Yang Baik
5. Jumlah Sarana dan Prasarana Angkutan Darat dan Laut Yang Tersedia
6. Jumlah Kendaraan Yang Memenuhi Laik Angkutan Jalan
7. Angka Kecelakaan lalu Lintas Darat dan Laut

Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dari rata – rata capaian 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran tersebut dapat dinyatakan sangat baik dari target yang telah ditetapkan.

Begitu juga bila dilihat dari segi pendanaan, dalam tahun 2023 nilai capaian kinerja Dinas Perhubungan dengan total pagu dana Rp.8.290.200.212,- pada APBD Perubahan, terealisasi sebesar Rp. 7.934.437.954,-, (95,71%) , dengan rincian sebagai berikut:

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 5,603,132,212,- Terealisasi sebesar Rp. 5,285,775,124 dengan persentase (94.34%).
- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 1,174,968,000,- Terealisasi sebesar Rp. 1,153,142,430,- dengan persentase (98,14%)
- Program Pengelolaan Pelayaran Dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 1,512,100,000,- Terealisasi Sebesar Rp. 1,495,520,400,- dengan persentase (98,9%)

Dari seluruh sub kegiatan yang dilaksanakan terdapat 8 sub kegiatan yang realisasinya dibawah 90 % yaitu:

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.14.900.000,- terealisasi sebesar Rp. 13.100.000 (87,92%). Sisa anggaran sebesar Rp. 1.800.000,- merupakan Efisiensi belanja yang merupakan sisa belanja Belanja cetak atau fotocopy dokumen dokumen perencanaan untuk tahun 2023.

2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 68.000.000, terealisasi sebesar Rp. 52,818,150 (77,67%). Sisa anggaran sebesar Rp. 15,181,850 merupakan Efisiensi belanja yang merupakan sisa belanja asuransi kendaraan 2023.

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 469,909,000, terealisasi sebesar Rp. 417,117,749 (88,77%). Sisa anggaran sebesar Rp. 417,117,749 merupakan Merupakan efisiensi dari Belanja Bahan Bakar dan Pelumas dikarenakan terdapat kerusakan pada salah satu kendaran dinas operasional lapangan.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Kinerja Dinas Perhubungan dapat dikategorikan sangat baik namun perlu mendapatkan perhatian yang serius untuk masa yang akan datang dalam penyempurnaan- penyempurnaan Kinerja Dinas untuk itu perlu pengembangan dan peningkatan Sumber Daya Manusia maupun pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang.



PENGUKURAN KINERJA **TRIWULAN IV** MELALUI
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021 s/d 2023
DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi	Realisasi		Target 2023						Sumber Data	KET
			2021	2022	Target	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Capaian %		
1.1. Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Melalui Ketersediaan Sarana Dan Prasana Taransportasi Darat Dan Laut	1.1.1. Persentase Trayek Angkutan Darat Yang Tersedia	Rumus Indikator : $\frac{\text{Jumlah Jaringan Trayek Yang Tersedia} \times 100\%}{\text{Jumlah Jaringan Trayek Yang Dibutuhkan}}$	50%	0%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	Dishub	
	1.1.2. Jumlah Halte Sungai Yang Tersedia	Jumlah Halte Sungai Yang Sudah Dibangun	2 Unit	3 Unit	1 Unit	0	0	3 Unit	0	3 Unit	Dishub	
	1.1.3. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun	Jumlah orang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	1.9230 Orang	291.098 Orang	194.000 Orang	36.377 Orang	49.342 Orang	42.654 Orang	215.696 Orang	111%	Dishub	
		Jumlah barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	6.158 Ton	2.544 Ton	6.300 Ton	2102 Ton	3102 Ton	4120 Ton	12422 Ton	197%	Dishub	
	1.1.4. Kapasitas Ruas Jalan Yang Baik	Pengukuran Kapasitas Jalan Rawan Kecelakaan Yang Memenuhi Tingkat Pelayanan Baik	0,35 (A)	0,20 (A)	A	0%	0%	0%	A	A	Dishub	
1.2. Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Darat dan Laut	1.2.1. Jumlah Sarana dan Prasarana Angkutan Darat dan Laut Yang Tersedia	Jumlah Fasilitas Keselamatan/Rambu lalu Lintas Yang Terpasang Pada Titik Rawan Kecelakaan Tahun-n	17 Unit	8 Unit	40 unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	20 Unit	50%	Dishub	
	1.2.2. Jumlah Kendaraan Yang Memenuhi Laik Angkutan Jalan	Jumlah Kendaraan Yang Lulus Uji Elektronik	0 Unit	0 Unit	1180 Unit	299 Unit	654 Unit	1184 Unit	1755 Unit	148%	Dishub	
	1.2.3. Angka Kecelakaan lalu Lintas Darat dan Laut	Jumlah Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Darat dan Laut	66 Kasus	65 Kasus	30 Kasus	0%	0%	0%	20 Kasus	150%	Dishub	

Uraian Pengukuran dan Analisis Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 Perbandingan pada tahun sebelumnya :

1. SASARAN STRATEGIS 1

Sasaran 1 Dinas Perhubungan adalah Menguatnya Aksebilitas Masyarakat Melalui Ketersediaan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat dan Laut. Sasaran 1 memiliki 4 indikator kinerja yang mendukung terlaksananya sasaran tersebut, yaitu :

a. Realisasi Capaian Target Kinerja (%)

1. Indikator 1 : Persentase Trayek Angkutan Darat Yang Tersedia

Indikator sasaran ini bertujuan sebagai upaya pemenuhan pelayanan publik menyangkut peningkatan ekonomi masyarakat, dan juga sebagai tolak ukur pencapaian misi RKPD Kab. Tanjung Jabung Barat untuk mengembangkan konektivitas antar pedesaan ke kota melalui lintasan darat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ekonomi di desa maupun kota.

Pada indikator ini pencapaian kinerja kinerja Tahun 2023 0% dengan target 50% tersedianya dokumen jaringan trayek angkutan penumpang. Pada tahun 2023 pencapaian target **Tidak Terealisasi**. Perbandingan antara realisasi di tahun 2022 **0%** dan realisasi di tahun 2023 **0%**.

Permasalahan dan Solusi

❖ **Permasalahan**

- Permasalahan angkutan umum di Kab. Tanjung Jabung Barat adalah armada yang kurang memadai, prasarana yang kurang mencukupi, minat pengguna angkutan umum yang rendah, serta peran regulator dan operator yang belum optimal. Hal ini terlihat dengan kondisi operasional yang kurang baik.
- Serapan kebutuhan anggaran untuk penyusunan dokumen jaringan trayek belum terpenuhi.
- Untuk mengakomodasi kebutuhan pengguna angkutan umum diperlukan perbaikan armada yang beroperasi, sistem pelayanan, serta manajemen operasional dan keuangan dengan mengintegrasikan semua kepentingan yang ada.

❖ **Solusi**

- Perlunya penanganan yang lebih intensif terkait pengelolaan angkutan umum sehingga lebih menarik peminat pengguna.
- Alokasi anggaran pada kegiatan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas agar dapat direalisasikan tiap tahunnya.
- Pengembangan Jaringan Lalu Lintas perhubungan Darat perlu dilakukan penanganan secara menyeluruh karena permasalahan angkutan umum, baik penyebab maupun solusinya, terkait juga dengan bidang yang lain, dan
- pengembangan angkutan umum perlu diintegrasikan dengan sistem pembentuk kota

2. Indikator 2 : Jumlah Halte Sungai Yang Tersedia

Indikator sasaran ini bertujuan sebagai upaya pemenuhan pelayanan publik menyangkut kebutuhan sarana transportasi, dan juga sebagai tolak ukur pencapaian misi RKPD Kab. Tanjung Jabung Barat untuk mengembangkan konektivitas antar pedesaan ke kota sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ekonomi di desa maupun kota.

Pada indikator ini pencapaian kinerja kinerja Tahun 2023 mencapai angka 100% atau realisasi 3 Unit halte sungai yang sudah tersusun dengan target 1 Unit .pada tahun 2023 pencapaian target sudah **sangat baik**. Perbandingan atara realisasi di tahun 2022 **100%** dan realisasi di tahun 2023 meningngkat target 1 unit dan realisasi 3 unit **150%**.

Permasalahan dan Solusi

❖ Permasalahan

- Realisasi capaian kinerja untuk indikator ini sudah sangat baik dan terdapat peningkatan setiap tahunnya, permasalahannya masih banyak target halte sungai jangka panjang yang belum terbangun secara menyeluruh sebagai penghubung dari desa ke desa sampai ke kota.
- Perlu menyusun proposal dan dokumen pendukung lainnya.

❖ Solusi

- Alokasi anggaran pada kegiatan pembangunan halte sungai agar dapat direalisasikan tiap tahunnya.
- Penyempurnaan penyediaan fasilitas perhubungan laut, sungai danau dan penyeberangan seperti halte sungai.
- Meningkatkan Pengendalian, Pengawasan terhadap layanan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

3. Indikator 3 : Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Terminal Pertahun

Indikator sasaran ini bertujuan untuk mengukur ketepatan penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang dirasakan oleh masyarakat sehingga terciptanya peningkatan aksesibilitas masyarakat.

Pada indikator ini pencapaian kinerja kinerja Tahun 2023 mencapai angka **diatas**100% atau Realisasi 215.000 Orang dan 12.422 dengan target 194.000 Orang dan 6.300 ton Barang. pada tahun 2023 pencapaian target terbilang **sangat baik** dengan Perbandingan atara Realisasi tahun 2022 Persentase 105 % dan 152% dengan Persentase 111% dan 197%.

Permasalahan dan Solusi

❖ Permasalahan :

- Realisasi tergambar sangat baik hanya saja pengawasan dan penertiban keamanan kurang terpantau dikarenakan padatnya jumlah pengguna jasa

transportasi, sehingga masih terdapat calo dan premanisme yang berkeliaran di area pelabuhan/terminal.

- Kurangnya partisipasi warga yang mengikuti mekanisme pelayanan kepelabuhan/ terminal.

❖ **Solusi**

- Pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan
- Peningkatan SDM Aparatur melalui diklat dan pelatihan khusus
- Penegakan hukum dan melakukan operasi tertib pengawasan kepelabuhan/ terminal
- Memberikan sosialisasi yang berkaitan dengan SOP Kepelabuhan/terminal.

4. Indikator 4 : Kapasitas Ruas Jalan Yang Baik

Indikator sasaran ini bertujuan untuk mengukur kemampuan ruas jalan untuk melayani kebutuhan arus lalu lintas sesuai dengan fungsinya yang dapat diukur dan dibandingkan dengan standar tingkat pelayanan jalan. parameter karakteristik lalu lintas yaitu **kecepatan, kepadatan, dan volume**.

Pada indikator ini pencapaian kinerja kinerja Tahun 2023 mencapai angka **Baik**, atau realisasi ruas jalan kondisi baik (A) . dengan target angka 0,73 rasio. pada tahun 2023 pencapaian target terbilang **baik** dengan Perbandingan antara Realisasi tahun 2022 dengan angka 0,20 (A) dan Realisasi tahun 2023 dengan angka (A).

Permasalahan dan Solusi

❖ **Permasalahan :**

- Penyesuaian standar penyediaan jalan harus sesuai dengan fungsinya. Masih banyak terdapat jalan yang kesesuaian lebar jalan, tipe jalan, pemisah arah, hambatan samping (side friction) dan bahu jalan/kereb dan ukuran kota (city size) tidak sesuai standar dan fungsinya.
- Fungsi jalan tidak efektif dikarenakan Lebar rata-rata yang tersedia untuk pergerakan lalu lintas setelah pengurangan akibat parkir tepi jalan, atau penghalang sementara lain yang menutup jalur lalu lintas.

❖ **Solusi**

- Solusi yang diberikan yaitu berupa perbaikan kapasitas jalan.. dengan cara melakukan pelebaran geometrik jalan jika memungkinkan. Atau mengubah tipe jalan menjadi 2 jalur atau sebagainya.
- Melakukan penertiban angkutan kendaraan yang parkir di badan jalan dan pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar bahu jalan

2. SASARAN STRATEGIS 1

Sasaran 2 Dinas Perhubungan adalah Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Darat dan Laut. Sasaran 2 memiliki 3 indikator kinerja yang mendukung terlaksananya sasaran tersebut, yaitu :

1. Indikator 1 : Jumlah sarana dan prasarana angkutan darat dan laut yang tersedia.

Indikator sasaran ini bertujuan untuk upaya pemenuhan sarana keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan pengguna jasa transportasi darat laut, sungai danau dan penyeberangan.

Pada indikator ini pencapaian kinerja tahun 2023 mencapai predikat **cukup baik**, karena jumlah ketersediaan prasarana yang diukur melalui penyediaan rambu rambu lalu lintas cukup memenuhi target yang ditentukan. Pada tahun 2022 realisasi mencapai angka 47% dengan target 35 unit. Perbandingan Realisasi penyediaan sarana dan prasarana transportasi pada tahun 2023 meningkat yaitu pada tahun 2023 **50%** dan di tahun 2022 **47%**.

Permasalahan dan Solusi

❖ Permasalahan :

- Masih minimnya sarana dan prasarana lalu lintas angkutan seperti rambu lalu lintas dan lainnya sebagai sarana prasarana perhubungan yang mendukung pelayanan terhadap pengguna jasa transportasi laut sungai dan penyeberangan. Sarana dan prasarana tentunya menjadi instrument penting menuju keselamatan transportasi.

❖ Solusi

- Pemenuhan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas angkutan jalan.
- Peningkatan SDM Aparatur melalui diklat dan pelatihan khusus
- Penagakan hukum dan melakukan operasi tertib lalu lintas rutin

2. Indikator 1 : Jumlah kendaraan yang memenuhi laik angkutan jalan

Indikator sasaran ini bertujuan sebagai upaya memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan. Mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran udara yang diakibatkan penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan. Dan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Serta untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat.

Pada indikator ini pencapaian kinerja di tahun 2023 mencapai predikat sangat **baik**. Jumlah kendaraan yang memenuhi standar laik uji adalah 1755 unit dengan target di tahun 2023 adalah 1180 unit dengan realisasi capaian (148%). Dan

realisasi capaian di tahun 2022 adalah 0 Unit Perbandingan antara pencapaian kinerja di tahun 2022 dan tahun 2023 meningkat sebesar (148%).

Permasalahan dan Solusi

❖ Permasalahan :

- Capaian target sangat baik hanya saja kondisi gedung PKB masih kurang memadai perlu dilakukan rehab berat dan penyediaan kelengkapan alat uji kendaraan bermotor.

❖ Solusi

- Pemenuhan sarana dan prasarana Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor
- Peningkatan SDM Aparatur melalui diklat dan pelatihan khusus

3. Angka kecelakaan lalu lintas darat dan laut

Indikator sasaran ini bertujuan untuk mengukur tingkat kecelakaan pada suatu ruas jalan tertentu.

Pada indikator ini pencapaian kinerja kinerja Tahun 2023 mencapai angka 150% atau realisasi 20 Kasus dengan target 30 kasus. pada tahun 2023 pencapaian target terbilang sangat **baik** karena perbandingan persentase meningkat dan menunjukkan kasus yang terjadi lebih rendah dari prediksi target yang ditentukan. Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat. Perbandingan antara realisasi di tahun 2022 **65 Kasus** dan realisasi di tahun 2023 **20 Kasus**.

Permasalahan dan Solusi

❖ Permasalahan :

- Masih minimnya sarana dan prasarana lalu lintas angkutan seperti marka, rambu lalu lintas, halte, traffic light dan lainnya merupakan sarana prasarana perhubungan yang mendukung pelayanan terhadap pengguna jasa transportasi. Sarana dan prasarana tentunya menjadi instrument penting menuju keselamatan lalu lintas.
- Kurangnya partisipasi warga kabupaten untuk memahami dan mematuhi aturan lalu lintas.

❖ Solusi

- Pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan
- Peningkatan SDM Aparatur melalui diklat dan pelatihan khusus
- Penagakan hokum dan melakukan operasi tertib lalu lintas
- Memberikan sosialisasi yang berkaitan dengan keselamatan lalu lintas

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



SYAMSUL IBRAHIM, S.Sos
Pemuda Utama Muda
NIP. 19701223 199203 1 001